

SAMBUTAN

SEKRETARIS JENDERAL

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

Pada Acara Seminar:

***”Pengelolaan Kota yang Efektif melalui Pembangunan PSPU:
Permasalahan, Kebijakan, Strategi, dan Kerangka Hukum”***

Jakarta, 7 Desember 2005

*Yth, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri,
Yth, Deputi Bidang Otonomi dan Pembangunan Daerah, Bappenas,
Yth, para Dirjen di lingkungan Departemen PU,
Yth, Kepala BKPSDM Departemen PU, dan
Para tamu undangan yang kami hormati,*

**Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,**

- Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kita semua pada hari ini dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti seminar sehari yang akan membahas topik ***”Pengelolaan Kota yang Efektif melalui Pembangunan PSPU: Permasalahan, Kebijakan, Strategi, dan Kerangka Hukum”***.
- Saya menyambut baik acara seminar dengan topik tersebut, karena pada saat ini, sejalan dengan semakin kompleksnya masalah perkotaan, kita perlu mengingatkan kembali berbagai pihak terkait tentang pentingnya pengelolaan kota.

Hadirin yang terhormat,

- Sebagai kawasan yang relatif lebih lengkap prasarana dan sarananya, kota telah menimbulkan daya tarik yang sangat besar bagi terjadinya arus perpindahan penduduk dari perdesaan ke perkotaan. Pertumbuhan kota-kota "baru" yang terus berkembang dan kompleksitas kota-kota "lama" yang tidak lepas dari permasalahan, dan juga berkembangnya kawasan-kawasan metropolitan yang mengkaitkan beberapa kota dalam satu sistem pengembangan, telah menyebabkan pentingnya kota dikelola dengan manajemen modern dan didukung sumber daya manusia yang memadai.
- Pada sisi yang lain, sebuah kota dimanapun lokasinya, selain mampu menarik warga desa berpindah ke kota-kota dan menyebabkan peningkatan jumlah penduduknya, juga disertai dampak ikutan yang sulit dikesampingkan terutama dalam hal keterbatasan ketersediaan dan kemampuan pelayanan infrastruktur penunjang aktivitas masyarakat kota.
- Padahal, seperti kita ketahui bersama, kecepatan peningkatan penduduk perkotaan dan kebutuhan warga kota terhadap prasarana dan sarananya selalu tidak sejalan dengan kecepatan penanganannya yang disesuaikan dengan kebutuhan tersebut.
- Sebagai ilustrasi, apabila pada tahun 1980-an penduduk kota di Indonesia baru mencapai sekitar 22,4% dari total penduduk, maka pada tahun 2004 lalu angka tersebut telah mencapai sekitar 42%. Namun demikian, semakin bertambahnya

penduduk perkotaan tidak harus berkonotasi negatif. Pengalaman di negara maju menunjukkan bahwa bila kota dikelola dengan baik, maka dengan semakin besar penduduk yang tinggal di perkotaan, justru tingkat perkembangan ekonomi nasional meningkat semakin tinggi pula.

- Dengan pertumbuhan penduduk kota yang terus meningkat dan dengan manajemen pembangunan kawasan perkotaan yang perlu disesuaikan sejalan dengan dinamisasi serta perubahan pada tatanan masyarakat, kelembagaan, dan kerangka hukumnya, terutama di kawasan metropolitan, maka pembaruan pemikiran, kebijakan, strategi, dan landasan hukum yang mengatur perkotaan perlu dimantapkan kembali agar penanganan kawasan perkotaan di masa depan lebih efektif.

Hadirin yang terhormat,

- Salah satu dukungan dalam mengefektifkan pengelolaan kawasan perkotaan adalah pertama-tama tersedianya rencana tata ruang yang selanjutnya menjadi acuan bagi penyediaan prasarana dan sarana yang memadai guna mendukung aktivitas warga kota, termasuk prasarana dan sarana pekerjaan umum (PSPU). Dengan demikian, dengan adanya Rencana Tata Ruang Kota yang baik maka dapat diwujudkan lingkungan permukiman kota yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
- Rencana tata ruang kota yang baik perlu disusun dengan melibatkan semua stakeholders, baik pemerintah, masyarakat,

dan swasta, melalui mekanisme tertentu yang memungkinkan semuanya dapat terlibat secara aktif. Melalui mekanisme tersebut diharapkan dapat dibangun komitmen bersama, sehingga rencana tata ruang yang disusun dapat menjadi acuan bersama didalam penyusunan program-program pembangunan sebagai pengisi ruang kota, termasuk dalam pembangunan infrastruktur kota.

- Kita mengetahui bahwa sejak tahun 1998, kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur ke-PU-an yang meliputi infrastruktur transportasi, infrastruktur sumber daya air, infrastruktur penyediaan air minum, infrastruktur penyehatan lingkungan permukiman, serta perumahan sempit mengalami penurunan baik kuantitas maupun kualitasnya.
- Kondisi tersebut diperburuk dengan banyaknya kerusakan infrastruktur akibat bencana alam di beberapa provinsi dimana upaya pemulihan menjadi sulit dan bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, namun menjadi tugas dan kepedulian bersama seluruh komponen bangsa.
- Berkurangnya kualitas pelayanan dan penyediaan prasarana serta tertundanya pembangunan infrastruktur baru sudah barang tentu menjadi salah satu faktor penghambat kemajuan pembangunan nasional, termasuk di kawasan-kawasan perkotaan yang memerlukan investasi yang sangat besar dalam pembangunan infrastrukturnya.
- Kita menyadari bahwa pembangunan infrastruktur di masa datang dihadapkan pada terbatasnya kemampuan pemerintah

dalam penyediaannya. Oleh sebab itu, sejak tahun ini pemerintah telah memproyeksikan dalam 5 (lima) tahun ke depan, pembangunan dan penanganan sebagian infrastruktur sudah dapat sepenuhnya dilakukan oleh swasta seperti jalan tol, dan penyediaan air bersih.

- Sedangkan untuk infrastruktur lainnya yang kurang menarik minat investor swasta, tetap menjadi tanggungjawab pemerintah dalam pembangunan dan pemeliharannya, seperti misalnya jaringan jalan non tol, jaringan irigasi, dan fasilitas sanitasi.

Hadirin yang terhormat,

- Saat ini tantangan pembangunan infrastruktur terkait dengan pembangunan di kawasan perkotaan masih dirasakan sangat berat. Seperti pada bidang jalan, belum seluruh jalan nasional di perkotaan dalam kondisi baik, terlebih lagi untuk jalan propinsi dan jalan kabupaten/kota.
- Pada bidang cipta karya terutama yang menyangkut infrastruktur air bersih/air minum dan sanitasi, ditemui kondisi sistem air bersih terbangun baru melayani 45 juta atau 40 persen penduduk perkotaan. Sebagian besar PDAM masih tidak sehat baik secara teknis maupun manajerial yang menyebabkan tidak mampu memberikan pelayanan air minum dengan baik. Sedangkan masyarakat miskin di kawasan rawan air harus berjuang untuk mendapatkan air bersih dengan harga yang lebih mahal dibanding kelompok yang lebih mampu di perkotaan.

- Untuk pengolahan air limbah, pelayanan sistem pengolahan air limbah masih terbatas dimana pelayanan di perkotaan terpusat baru dapat melayani sebagian penduduk pada 8 kota, dengan tingkat pelayanan sanitasi di perkotaan baru mencapai 78 juta jiwa atau 70 persen penduduk termasuk pelayanan persampahan perkotaan yang baru mencapai 38 persen dari jumlah penduduk.

Hadirin yang terhormat,

- Menghadapi tantangan tersebut, kebijakan dan strategi yang dikembangkan Departemen PU sesuai dengan Renstra 2004-2009, adalah pertama-tama melalui penyelenggaraan dan operasionalisasi penataan ruang kota dan kawasan, yang selanjutnya menjadi acuan bagi pemantapan penyediaan infrastruktur, termasuk infrastruktur perkotaan.
- Dalam penyelenggaraan dan operasionalisasi penataan ruang, dipertegas mengenai kedudukan dan keterkaitan setiap tingkat rencana tata ruang, mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sampai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Selain itu juga dikembangkan rencana tata ruang untuk kawasan metropolitan yang merupakan kawasan strategis nasional mengingat potensi dan berbagai permasalahan yang ada di kawasan-kawasan metropolitan, sehingga memerlukan penanganan secara khusus.
- Pemantapan sistem jaringan jalan diarahkan mendukung pusat-pusat produksi, mendorong investasi dan menciptakan

lapangan kerja. Jaringan jalan dikembangkan sesuai sistem pengembangan kota, agar terstruktur mendukung kota sebagai pusat permukiman dan pusat pelayanan jasa distribusi, dan sekaligus pembentuk struktur kota. Selain itu juga dilakukan percepatan investasi jalan tol dengan mengembangkan berbagai skema pembiayaan terutama ruas jalan yang secara ekonomis maupun finansial sudah layak dibangun.

- Untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan juga akan semakin ditingkatkan berbagai infrastruktur perkotaan seperti misalnya penyediaan air bersih akan semakin ditingkatkan, khususnya melalui investasi swasta.
- Dalam rangka mengurangi kesenjangan infrastruktur antar wilayah, terutama pembangunan infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang baik, perlu diwujudkan untuk mendukung fungsi dan peran daerah perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan dengan dititik beratkan pada upaya peningkatan kapasitas daerah dalam penyiapan skenario pengembangan perkotaan dan perdesaan yang baik dan berimbang, mendorong keterkaitan hubungan kota-desa (*urban rural linkages*), serta permukiman yang layak huni dan produktif melalui penyediaan prasarana dan sarana dasar yang dapat mendorong berkembangnya ekonomi lokal, peningkatan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan.
- Pembangunan perkotaan perlu didorong sebagai penggerak pembangunan perdesaan diantaranya melalui pengembangan Kawasan Agropolitan dengan memberi nilai tambah industri dan jasa produksi.

- Sejalan dengan hal tersebut juga perlu dilakukan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh dan kawasan nelayan terutama air bersih dan fasilitas sanitasinya termasuk pada daerah rawan air di perkotaan. Selain itu juga dilaksanakan pembinaan bangunan gedung dalam rangka memenuhi standar keselamatan dan keamanan bangunan dan peningkatan produktivitas fungsi kawasan perkotaan dan revitalisasi kawasan bersejarah, pariwisata, dan kawasan lainnya yang menurun kualitasnya serta pembinaan ruang terbuka hijau.

Hadirin yang terhormat,

- Dengan gambaran yang diuraikan di atas, maka pada acara seminar hari ini diharapkan akan dihasilkan solusi dalam menghadapi permasalahan, tantangan, dan perkembangan mutakhir di kawasan perkotaan sebagaimana telah saya sampaikan.
- Saya berkeyakinan, bahwa dengan pengalaman yang langsung dihadapi oleh saudara-saudara selaku pemangku pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan, maka pada hari ini kita semua mengharapkan berbagai masukan yang akan memperluas khazanah pemikiran dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan landasan pengaturan pengelolaan perkotaan yang efektif.
- Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih atas prakarsa Pusat Kajian Strategis dalam menyelenggarakan

kegiatan ini. Kepada semua pihak yang telah bersama-sama mendukung kegiatan ini, atas nama pimpinan departemen saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

- Akhirnya, dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim", Seminar Sehari dengan tema "***Pengelolaan Kota yang Efektif melalui Pembangunan PSPU: Permasalahan, Kebijakan, Strategi, dan Kerangka Hukum***" dengan resmi saya nyatakan dibuka.
- Terima kasih atas perhatiannya. **Wasalamualikum warahmatullahi wabarrakatuh.**

Jakarta, 7 Desember 2005

Sekretaris Jenderal Dep. PU,

Roestam Sjarief